

---

## **Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengetasan Kemiskinan di Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Dahlia A.E. Talumesang<sup>1</sup>**

**Darah Sambiran<sup>2</sup>**

**Donald K. Monintja<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja tetapi juga melihat masalah ketergantungan harga diri kontinuitas pendapatan dan sebagainya kemiskinan dengan tidak melihat aspek di rincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan social dan budaya. Program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga RTSM, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Melihat kondisi desa talengen ada beberapa keluarga miskin yang layak menerima bantuan PKH namun oleh karena sesuatu dan lain hal keluarga miskin ini malah terabaikan dari program ini kondisi ini menunjukkan data yang akan di jadikan rujukan simpang siur di lain pihak masyarakat penerima bantuan ini cenderung juga menggunakan bantuan ini bukan pada porsi peruntukan program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa program keluarga harapan (PKH) desa talengen mendapat dukungan dari berbagai pihak desa dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal

**Kata Kunci : Kinerja, Dinas, Pemberdayaan, Generasi Muda**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Kemiskinan mengandung arti tidak berharta (harta tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo klasik dimana kemiskinan hanya di lihat dari interaksi negatif (ketidak seimbangan) antara pekerja dan upah yang di peroleh. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dan sebagainya kemiskinan dengan tidak melihat aspek di rincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya. (Dr.Drs.Novie Revlie Pioh, M.Si Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No.1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi)

Melihat kondisi desa talengen tentang kemiskinan sehingga pemerintah memuat program bantuan untuk keluarga miskin yaitu program keluarga harapan (PKH), Program keluarga harapan ini dapat kita lihat dalam peraturan menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan ("**Permesos 1/2018**") PKH adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin danrentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sasaran PKH yaitu keluarga miskin

yang memenuhi syarat, Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, kewajiban, PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta, timbang badang anak balita sedangkan kewajiban di bidang pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah

Ditemui dilapangan ada beberapa peredaan jumlah keluarga miskin di kabupaten kepulauan sangihe baik itu data dari kantor desa talengen kecamatan tabukan tengah maupun dari dinas sosial kabupaten kepulauan sangihe kondisi ini menunjukan data yang akan di jadikan rujukan simpang siur, di lain pihak masyarakat penerima bantuan ini cenderung juga menggunakan bantuan ini bukan pada porsi peruntukan program ini. Dari data yang di temui di lapangan menunjukan belum tepatnya sasaran program ini untuk keluarga rumah tangga sangat miskin (KRTSM)

## Tinjauan Pustaka

### Konsep program

#### • Pengertian program

Program menurut ( Jones : 2015 – 152) program di artikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut di bentuk rencana akan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapai kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah di mulai berbagai aspek yang harus di jalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri tercapai.

Program menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Didalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya terdapat program yang dimana program telah disusun sedemikian rupa untuk di laksanakan sehingga dapat membantu oraganisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama, alam hal ini yang dimaksud program adalah susunan

rencana kegiatan yang sudah di rancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program harus di buat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan oraganisasi dalam mencapai sebuah tujuan selain itu program sendiri juga dapat menajadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan dan hasilnya akan dievaluasi pada masa akhir program

### **Konsep program keluarga harapan**

Penegertian dan tujuan Program Keluarga Harapan / PKH, Adalah program perlindungan sosail yang memberikan antuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksakan pesyaratan dan ketentuan yang di tetapkan. Mengenai program keluarga Harapan (“PKH”) **pengeturanya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan (“Permensos 1/2018”** PKH Adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan infomasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial adalah berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosai. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseoarng yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu progam penanganan fakir miskin,memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

### **Kriteria Komponen Kesehatan** Meliputi :

- Ibu hamil/menyusui ; dan
- anak berusia 0 (nol) samapai dengan 6 (enam) tahun.

### **Keteria Komponen Pendidikan** Meliputi :

- Anak sekolah dasar/mendrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- Anak sekolah menengah pertama/mendrasah tsanawijaya atau sederajar;

- Anak sekolah menengah atas/mendrasah aliyah atau sederajat; dan
- Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) Tahun yang belum menyelesaikan wajibbelajar 12 tahun.

### **Keteria Komponen Kesejahteraan Sosial** Meliputi :

- lanjut usia dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

### **Tujuan PKH**

PKH ini bertujuan untuk

- Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- mengenalkan mafaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

### **Keluarga Penerima Manfaat PKH behat mendapatkan;**

- Bantuan sosial PKH;
- Pendampingan PKH;
- Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosail; dan
- Program bantuan komplementer di bidang keshatan, pendidikan, subsidi, energi,ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### **Selain memiliki hak keluarga penerima manfaat PKH juga memiliki kewajiban yaitu berkawajiban untuk :**

- memeriksakan kesehatan fasilitas pelayaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatanbagi ibu hamil menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

- mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (Delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun; dan
- mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Jadi, PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

#### **Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan**

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi bantuan sosial PKH dari setiap penyaluran bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. Nilai bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH.

Kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama keluarga manfaat PKH. Rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH itu dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera.

#### **Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Dapat Dikecualikan Bagi :**

- Penyandang disabilitas berat
- Lanjut usia terlantar nonpotensial
- Eks penderitaan penyakit kronis nonpotensial
- Komunitas adat terpencil; dan/atau

- Daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai.

#### **Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi :**

- meninggal dunia melakukan aktivitas kartu keluarga sejahtera; dan
- menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivitas kartu keluarga sejahtera.

#### **Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivitas kartu keluarga sejahtera dan keluarga penerima manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivitas kartu keluarga sejahtera, mengajukan permohonan bantuan PKH dengan melengkapi persyaratan :**

- surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
- surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris keluarga penerima manfaat yang berhak menerima dana bantuan sosial PKH; dan/atau
- surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia

#### **Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH :**

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai meliputi

##### ✓ **Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH**

Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH

##### ✓ **Sosialisasi dan Edukasi;**

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank penyalur bantuan sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima bantuan sosial PKH

✓ **Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera**

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada keluarga penerima manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah di terima oleh keluarga penerima manfaat harus dilakukan aktivasi. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan kartu keluarga Sejahtera telah di terima oleh penerima manfaat PKH.

✓ **Proses Penyaluran Bantuan PKH**

Proses penyaluran bantuan PKH dilaksanakan oleh kementerian sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran bantuan Sosial PKH itu dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbuku an dana dari rekening pemerian bantuan sosial PKH di Bank Penyaluran kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.

✓ **Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH**

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan Bank Penyalur dan/atau agen yang di tunjuk oleh Bank Penyalur.

✓ **Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH**

Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Rekonsiliasi

hasil penyaluran Bantuan sosial PKH itu dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bang Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.

✓ **Pemantauan, Evakuasi, dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH**

Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH Dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH. Kemudian pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara berkala oleh bank penyalur kepada kementerian sosial

Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi erikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembagunan Millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu; Pengurangan penduduk miskin dan kelapran, Pendidikan dasar,, Kesetaraan Gender, Pegurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.

**Konsep kemiskinan**

• **Pengertian kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar

hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 2014 : 56). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2014: 10). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2014:11). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2014:64). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (Proper) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi

- ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
2. Ketidakberdayaan (Powerless) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
  4. Ketergantungan (dependency) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
  5. Keterasingan (Isolation) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah

faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

- **Bentuk dan jenis kemiskinan**

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahterannya sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2014: 124):

1. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan

diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
3. Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

### **Metode Penelitian**

penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitaitaif. Model

penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut bogdan dan taylor (moleong 2015 : 3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang program PKH dalam pengetasan kemiskinan di desa talengen kecamatan tabukan tengah kabupaten kepulauan sangihe dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang di kaji , maka dapat di simpulkan :

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari program keluarga harapan di desa talengen. Penerapan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut. Komunikasi di dalam suatu program merupakan hal yang penting. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud program.

#### **2. Sumber daya**

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi jalannya suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya program keluarga harapan di desa talengen. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

##### **❖ Sumberdaya manusia**

Sumberdaya yang utama dalam penerapan program adalah sumberdaya manusianya (staf) kegagalan yang sering terjadi dalam suatu organisasi salah satunya disebabkan oleh manusiannya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya manusia.

##### **❖ Sumberdaya finansial**

Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, bahkan terkadang program memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program keluarga harapan (PKH).

#### **3. Disposisi**

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya program kebijakan adalah sikap staf. Jika staf setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses penerapan program akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Maka biasanya ditempuh penyelesaian ataupun

antisipasi dengan upaya penempatan pegawai sesuai dengan dedikasi dan bidangnya,serta pemberian insentif.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan produser atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam program pengentasan kemiskinan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Selain itu kadangkala dalam pelaksanaan suatu program terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana sehingga dibutuhkan adanya koordinasi *SOP (standar operating procedure)*

#### 5. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Adapun dalam program PKH di desa talengen ini melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya dari pihak kecamatan, korbab PKH, pendamping PKH, kades dan masyarakat sebagai sasaran dari program ini.

#### 6. Motivasi

Pada dasarnya cita-cita PKH adalah untuk memberdayakan KPM sebagai sasaran yang diberdayakan agar sejalan dengan tujuan PKH yaitu untuk memberantas kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan memutus rantai kemiskinan. Terdapat tiga unsur dalam pelaksanaan pemberdayaan PKH yaitu strategi,proses dan perubahan pola pikir, sikap serta perilaku. Hal tersebut tidak terlepas dari peran orangtua dan pendamping PKH yang selalu memberikan motivasi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan. Motivasi anak-anak untuk sekolah terdiri dari dua yakni secara internal dari kesadaran diri sendiri si anak dan faktor eksternal yakni dari motivasi orang tua dan lingkungan. Hal ini bahwa telah dijelaskan atau adanya pendampingan dari tim PKH untuk memotivasi terutama orang tuanya bahwa apabila anak berhenti sekolah maka tidak

akan mendapatkan bantuan lagi selain daripada itu pendamping PKH memberikan motivasi berupa penyampaian tujuan jangka panjang dari PKH adalah untuk keberlangsungan pencerdasan generasi penerus.hal ini ada aturan yang mengatur bahwa anak harus tetap rajin sekolah baik di SD, SMP , SMA dimana absennya atau kehadirannya minimal 85%. Apabila kurang dari 85% tiga kali berturut-turut maka bantuannya akan dihentikan sementara dan apabila tidak diindahkan sampai kepada pemutusan untuk dapat bantuan lagi.

#### 7. Perindustrian

Kementrian perindustrian bekerja sama denga kementrian sosial untuk mendorong pertumbuhan industrl kecil dan menengah. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dalam kerja sama ini, kemensos akan mempersiapkan keluarga dari program keluarga harapan untuk diberikan pendamping oleh kemenprin. Keluarga yang masuk dalam PKH tersebut akan didorong untuk bisa ikut serta dalam IKM. Menurut menteri perindustrian airlangga hartarto, kerja sama ini dilakukan sebagai langkah menekan angka kemiskinan. Dengan begitu, harapannya keluarga PKH bisa memiliki kemandirian ekonomi Sementara di desa talengen tidak adanya perindustrian yang dapat memajukan kemandirian ekonomi padahal begitu banyak hasil bumi seperti cengkeh,pala,kopra juga adanya hasil laut namun kurangnya kesadaran dari masyarakat desa itu sendiri dan minimnya bimbingan dari pendamping PKH

#### 8. Miras/perjudian

Miras/perjudian sudah menjadi adat istiadat di dalam masyarakat entah itu di kota maupun di desa itupun yang terjadi di masyarakat desa talengen begitu banyak yang masih menjadi salah satu keluarga miskin karena adanya faktor miras/perjudian yang membuat mereka semakin hari semakin menderit,kurangnya lapangan perkerjaan tidak mempunyai perkebunan tetapi masih sering minum-minuman keras dan berjudi tak akan membuat keluarga sejahtera walaupun dengan bantuan apapun dari

pemerintah kecuali adat istiadat miras/perjudian di hilangkan.

**Penutup**  
**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan (PKH) desa talengen mendapat dukungan dari berbagai pihak desa dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal. Penerapan program keluarga harapan (PKH) dalam pengetasan kemiskinan di desa talengen ini belum optimal. Dalam hal komunikasi setelah melakukan penelitian bahwa komunikasi dalam penerapan bantuan program keluarga harapan di desa talengen masih belum maksimal perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program keluarga harapan sampai ke warga-warga yang tinggal di perkebunan jauh dari kampung adapun mereka turun ke kampung sebulan sekali hanya untuk membeli keperluan seperti bahan memasak Sumberdaya manusia dalam penerapan program ini sudah cukup baik namun dalam hal ini sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi Disposisi dalam penerapan program ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan. Struktur birokrasi masih ada kendala dalam aspek fragmentasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan maupun pelaksanaan program ini.

**Saran**

1. Pentingnya pemerintah desa talengen dan perangkat desa serta instansi terkait untuk mengoptimalkan program keluarga harapan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga sangat miskin (RTSM)

2. Perlu adanya penambahan jumlah pendamping PKH sehingga tujuan program ini dapat tercapai
3. Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam dari para pelaksana program keluarga harapan kepada peserta penerima program keluarga harapan agar kedepannya dapat berjalan lebih baik.
4. Diharapkan kepada warga masyarakat peserta program keluarga harapan supaya menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan jika ada keluhan mengenai program keluarga harapan ini segera melaporkan kepada pendamping PKH untuk dicarikan solusinya
5. Dalam pelaksanaan PKH kementerian sosial, pemerintah kabupaten/kota, maupun kecamatan lebih meningkatkan pengawasan langsung jalannya program keluarga harapan ini dengan terus berkoordinasi dengan pendamping PKH di desa agar dapat dilihat bukti nyata kesiapan desa talengen dalam menjalankan kebijakan bantuan PKH ini. Serta para pendamping kiranya dapat menjadi pengarah yang baik bagi peserta PKH.

**Daftar Pustaka**

Chambers. 2010 Kemiskinan dan konsep teoritisnya  
 Daramurti dan rauta 2015. Pengkajian hukum tentang pemekaran dan penggabungan daerah  
 Dr.Drs.Novie Revlie Pioh, M.Si jurnal jurusan ilmu pemerintahan volume 1 no.1 tahun 2018  
 Fakultas ilmu sosial dan politik universitas sam ratulangi  
 Harahap. 2014 teori kemiskinan dan dimensi kemiskinan. Bandung  
 Henry George. 2015 progress and proverty  
 Jarnasy. 2015 pembangunan kota dan kondisi kemiskinan perempuan  
 Jones 2015. Program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial tahun 2018 sumatera

Utara

Kuncoro 2015. Pemekeraan wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia

Mikelsen 2017. Kemiskinan dan ketimpangan

Mubyarto 2015. Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan inflansi terhadap tingkat kemiskinan

Tahun 2001-2010

Nugroho 2014. Konsep kemiskinan kultural. Yogyakarta

Nugroho 2014. Program pengetasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Malang

Nugroho dan dauri 2014. Faktor-faktor penentu kemiskinan

Nugroho 2017. Konsep kemiskinan secara umum

Saleh 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas di Indonesia

Suharto 2010. Dimensi kemiskinan

Sar A levitan 2015. Kemiskinan dan kesenjangan

Suryawati 2014. Memahami kemiskinan secara multidimensional bandung alfabet

Soegijoko 2015. Fenomena program-program pengetasan kemiskinan

Soegijoko dan nasution 2015. Poverty in Indonesia

Todaro 2015. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi pendapatan perkapita inflasi dan

Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin. Sumatera utara

Sumber-sumber lain :

- Buku pedoman PKH
- Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (permensos 1/2018)
- Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangkah menengah nasional
- Undang-undang no 24 tahun 2004
- Undang-undang no 25 tahun 2000 tentang propenas
- Undang-undang no 32 tahun 2004
- Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah